

## FENOMENOLOGI KONSTRUKSI SOSIAL PADA KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS

**Mohammad Adi**

Departemen Riset dan Pendidikan, Madura Idea Foundation, Pamekasan

Email: [mohammadadiwaru1@gmail.com](mailto:mohammadadiwaru1@gmail.com)

**Moh. Fudholi**

Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan

Email: [aare\\_lee\\_81@yahoo.com](mailto:aare_lee_81@yahoo.com)

**Ridan Muhtadi**

Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan

Email: [ridanmuhtadi@gmail.com](mailto:ridanmuhtadi@gmail.com)

### Abstract

Kiai is an elite who has a very respectable position and is influencing the development of Islamic society. Kiai in Indonesia has become one of the strategic elite and is a figure who has a wide and deep knowledge of Islamic teachings. At this point can be seen the strategic roles of kiai in the context of socio-political life in Bangkalan Madura. Based on the study, it was found that the kiai proved to be the number of re-enumerators for the sake of the social conditions it faced, albeit still using the medieval style of thought. in general kiai concentrate on the world of education, social-political relations tend to be abandoned, so that when the flow of globalization emerged, many stuttering kiai responded. It is analyzed by using theory. Berger's social is referred to by the social framework in society. The research method used is qualitative phenomenology where data with observation and depth interview. The results of this study show the mindset of the people to construct the kiai politics and the factors that underlie the central role of kiai and politics.

**Keywords:** Social Construction, Society, Kiai, Politics

### Abstrak

Kiai merupakan suatu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai di Indonesia menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang

memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Bangkalan Madura. Berdasarkan studi, ditemukan bahwa, kiai terbukti melakukan sejumlah penafisiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan. Pada umumnya kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan, urusan sosial politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus globalisasi muncul, banyak kiai yang tampak gagap menanggapi. Hal ini dianalisis dengan menggunakan teori Konstruksi sosial Peter Berger yaitu digerakkan oleh frame pemikiran realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif dimana data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembentukan pola fikir masyarakat mengkonstruksi politik kiai dan faktor- factor yang melatar belakangi peran sentral kiai dan politik.

**Kata kunci:** Konstruksi Sosial, Masyarakat, Kiai, Politik.

## **Pendahuluan**

Masyarakat Madura pada mulanya hanya mengenal sosok Kiai sebagai bagian dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Bagi masyarakat Madura Kiai menjadi figur sentral yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sosial yang signifikan. Akan tetapi pada perkembangannya, Kiai tidak lagi menjadi satu-satunya sosok yang berpengaruh sebagai kekuatan sosial. Selain Kiai adalah figur kembar, yaitu *blater*. Kedua figur tersebut sama-sama mempunyai kredibilitas sesuai dengan kapasitasnya. Jika Kiai menjadi kekuatan sosial sebagai sentral perilaku masyarakat karena kredibilitas keagamaan yang dimiliki, sedangkan *blater* dipercaya sebagai sosok yang menguasai dunia hitam.<sup>1</sup>

Peran penting Kiai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti Kiai merupakan unsur yang paling esensial dalam masyarakat. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan Kiai. Dalam konteks ini, pribadi Kiai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2004.

<sup>2</sup> Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), 144.

Istilah Kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa.<sup>3</sup> Dalam bahasa Jawa, perkataan Kiai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: kesatu sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “Kiai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta, kedua gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. ketiga gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.<sup>4</sup>

Kiai merupakan kekuatan yang berpengaruh atas kemenangan partai yang ikut berkompetisi di setiap pemilu khususnya di Indonesia. Di tengah konstelasi politik nasional saat ini sosok Kiai menjadi incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam kepengurusan partai. Tim sukses yang telah dibentuk para pemimpin partai sekarang ini menunjukkan bahwa peran para Kiai yang signifikan akan dapat meraup suara. Tidak akan terlepas dari keikut-sertaan para Kiai yang punya basis massa yang riil.

Peran Kiai dalam politik selalu menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan, studi tentang Kiai tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor saja (Kiai sebagai pemuka/tokoh agama), melainkan Kiai mempunyai banyak wajah (*multy faces*) yang mencerminkan kompleksitas atau keragaman cara pandangan Kiai dalam berpolitik. Keterlibatan para Kiai dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung tidak bisa dihindarkan, karena mereka adalah potensi lokal yang dapat memberikan kontribusi atau memberi warna tersendiri bagi perpolitikan di tingkat daerah.

Dengan kemampuannya bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dimana peran mereka sangat menentukan dalam menciptakan rakyat yang partisipatif. Keterlibatan dalam penggalangan massa misalnya, mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Kiai dengan karismanya mampu menggerakannya kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini dikarenakan, pola hubungan Kiai dan santri yang sangat erat, merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik.

Hal ini juga didasarkan pada fakta hubungan santri dan Kiai tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren. Kiai sebagai elit lokal mempunyai karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan. Kiai dengan

---

<sup>3</sup> Manfred Ziemek. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: P3M, 1986) 130

<sup>4</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S), 55

massa yang sangat hormat kepadanya mampu mendorong atau mendulang suara kemenangan untuk calon Bupati atau Wakil Bupati. Sebagai imbalan atas jerih payah Kiai, Kepala Daerah (Bupati atau Wakil Bupati) akan memberikan berbagai macam fasilitas, sehingga implikasi politik yang ada berpengaruh terhadap pilihan politik rakyat yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam *iming-iming*, tidaklah lagi otonom karena hak yang seharusnya lebih banyak dimanfaatkan oleh rakyat sebagai cermin dari kedaulatan sudah teracuni berbagai kepentingan materi dan kekuasaan. Tarik menarik “kepentingan” antara kandidat dengan Kiai menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan, posisi Kiai sangat menentukan keberhasilan seorang calon Kepala Daerah.

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang konstruksi sosial tokoh masyarakat terhadap Kiai berpolitik praktis, komunitas keagamaan memang sudah banyak dilakukan. Namun, secara khusus penelitian tentang konstruksi sosial tokoh masyarakat yang sering dilakukan masyarakat Bangkalan sebagai syarat memperbaiki citra dan pandangan dalam masyarakat yang selama ini menjadi kelumrahan keliru memaknai gerak gerik Kiai berkecimpung di dunia politik praktis.

Penelitian ini, peneliti membahas secara mendalam tentang berbagai kehidupan tokoh masyarakat Madura dari tingkah laku kehidupan sehari – hari dan tindakan sosial masyarakat Madura secara faktual dan global ada juga pendekatan yang ada kaitanya dengan pola berpolitik tokoh masyarakat Bangkalan mengenai konstruksi sosial Kiai yang berpolitik praktis. Antara lain adalah makna konstruksi sosial bagi tokoh masyarakat Bangkalan dalam hal ini berbagai bentuk tingkah lakunya sehari-hari dan pola berpolitik praktis seorang Kiai. Proses desentralisasi telah menciptakan peluang lebih besar bagi Kiai untuk terlibat secara aktif dalam konstelasi politik, seperti menjadi anggota aktif atau pengurus partai politik atau mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur.

Dalam penelitian Muh Syamsuddin, “*Kiai dan Politik*” adalah keterlibatan Kiai dalam politik praktis, Fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elite-elite baru dan naiknya Kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru, akan tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di kepulauan Madura.<sup>5</sup> Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Adi dan Ridan Muhtadi, menunjukkan bahwa dalam menentukan capres-cawapres atau caleg-cawaleg sekalipun, seperti pemilihan

---

<sup>5</sup> Muh Syamsuddin. Kiai dan politik: keterlibatan kiai madura dalam politik praktis. Jurnal Sosiologi Reflektif, 7, (2013) 47-72.

Bupati dan Wakil Bupati di Madura 2014 yang banyak menyebabkan para kyai terjun langsung terhadap dunia politik praktis sehingga anggota masyarakat terhasut atas ajakan para Kiai. Para Kiai berlomba-lomba berkampanye dengan membawa salah satu nama partai yang di sepakatnya sebagai partai idolanya. Ini terjadi di daerah Bangkalan, karena mayoritas penduduk Bangkalan merupakan masyarakat yang *ta'dem* (patuh) terhadap titah Kiai tanpa mewaspadai ajakan para Kiai yang nantinya akan mengajak masyarakat kepada dunia politik praktis.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dari pasca reformasi ini dapat dikatakan keterlibatan Kiai-Kiai di Madura dalam politik praktis mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi melihat dari fenomena perilaku politik Kiai di Madura dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara sosiologis kekuatan jaringan Kiai didasarkan pada aspek sosiokultural dan agama, sehingga para santri, wali santri, alumni dan masyarakat di sekitar pesantren mampu menjadi faktor penentu bangunan karismatik seorang Kiai, dan dari karismatik itulah Kiai memiliki modal sosial (*social capital*) untuk berpengaruh dan mempengaruhi tindakan politik masyarakat. *Kedua*, Kiai berperan ganda, yaitu sebagai elit agama, di sisi lain sebagai elit politik. *Ketiga*, pada sisi kritik atas perilaku politik Kiai ialah dibutuhkan penyegaran perilaku politik Kiai yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, sebagaimana posisi asal Kiai sebagai elit agama Islam. Jika dicermati lebih jauh keterlibatan Kiai dalam politik praktis mulai berseberangan dengan masyarakat pendukungnya dan bergeser.

Dalam konteks ini, sesungguhnya peran tokoh masyarakat merupakan cara dan media sebagai syarat simbol yang ada di dalamnya untuk menjaga diri dari kekeliruan persepsi dan pandangan serta stateman miring dalam dunia yang didalamnya realitas membentuk sebuah komunitas. Keyakinan bahwa Kiai lah satu-satunya panutan segalanya yang ada dalam kehidupan ini. Hal yang paling spesifik dalam penelitian ini adalah mengetahui banyak faktor. Tidak hanya mengetahui faktor yang lain namun dalam internal diri dan eksternal diri, namun menjelaskan dan membagi berbagai motif yaitu motif sebab masyarakat melakukan interaksi sosial pada diri individu, selain itu yang terpenting adalah membahas perkembangan dari masa ke masa dalam pelaksanaan *konstruksi sosial tokoh masyarakat* sebagai suatu keyakinan dan melembaga yang terjadi dalam

---

<sup>6</sup> Mohammad Adi & Ridan Muhtadi. LANDASAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 2017. Hal 155-183.

masyarakat di Bangkalan, yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat sebagai realitas obyektif dan realitas subjektif.

## **Kajian Teori**

### **Teori Kontruksi Sosial**

Dialektis menjadi bagian dari sifat dasar manusia dalam bermasyarakat. Dengan artian, masyarakat selalu berdiskusi secara pribadi terhadap kebenaran sementara, Sehingga terdapat banyak studi dilakukan, untuk memberikan makna terhadap kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat. Kenyataan sosial lebih diterima sebagai kenyataan ganda dari pada hanya menjadi kenyataan tunggal, yang memiliki dimensi kehidupan individu-individu dan sosial melalui proses obyektif dan subyektif. Masyarakat sebagai produk manusia dan begitu juga sebaliknya manusia merupakan produk dari masyarakat menuai beberapa implikasi kenyataan obyektif dan subyektif yang mengitarinya.

Keberadaan masyarakat pada kenyataan subyektif dan obyektif maka setiap pemahaman teoritik mengenai masyarakat harus mencakup kedua aspek tersebut. Aspek-aspek tersebut memperoleh pengakuan yang semestinya apabila masyarakat dipahami dari segi suatu proses dialektis yang berlangsung terus menerus dan terdiri dari tiga moment yaitu: internalisasi, eksternalisasi, dan obyektifikasi. Keberadaan masyarakat tidak dapat dipikirkan bahwa akan berlangsung dalam suatu urutan waktu, akan tetapi serentak dikarakterisasi oleh ketiga momen tersebut. Sebuah proses terbentuk kesatuan dalam keanggotaan menjadi masyarakat tidak luput dari peran saling keterhubungan antara konsep internalisasi, eksternalisasi dan obyektifikasi.<sup>7</sup>

Pertama, Internalisasi, merupakan yang menggambarkan, proses seseorang dalam memaknai atau menafsirkan secara langsung peristiwa obyektif yang dihadapinya. Kondisi ini sebagai sebuah ungkapan dari proses subyektif orang lain yang telah memberikan makna secara subyektif bagi orang yang menerimanya atau dalam istilah Berger “saya dan dia”. Pemahaman akan dua hal tersebut bukan hasil dari penciptaan makna bebas dari individu yang terkucilkan, akan tetapi dimulai dengan individu mengambil alih dunia dimana sudah ada orang lain didalamnya.

---

<sup>7</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES. 1990

Sebenarnya pengambilalihan itu sendiri sampai tingkat tertentu merupakan suatu proses awal bagi setiap organisme manusiawi dan setelah diambil alih dunia itu dapat dimodifikasi dengan segala kreatifitas atau yang lebih kecil kemungkinan malahan diciptakan kembali. Bagaimanapun juga dalam bentuk internalisasi yang kompleks tidak hanya dapat dipahami proses subyektif orang lain yang berlangsung sesaat. Ini mengandaikan bahwa “ia dan saya” mengalami kebersamaan dalam waktu dengan cara yang lebih dari sekedar sepiintas lalu dan perspektif komprehensif yang mempertautkan urutan situasi secara inter subyektif (Berger dan Luckman, 1990:186-187).<sup>8</sup>

Kedua, Eksternalisasi, kondisi merupakan kelanjutan dari proses yang pertama, ketika telah mencapai taraf internalisasi, maka individu menjadi anggota masyarakat atau melakukan eksternalisasi eksistensi dirinya secara otomatis kedalam dunia sosial. maka seseorang atau individu sudah menjadi anggota masyarakat yang telah diinternalisasikan sebelumnya. Proses-proses sosial selanjutnya berjalan sesuai dengan pendefinisian situasi-situasi yang dialami bersama secara simbiosis mutualism. Sosialisasi merupakan salah satu media untuk mencapai taraf keanggotaan dalam masyarakat. Terdapat 2 tipe sosialisasi: pertama, sosialisasi primer yang secara sederhana dapat diartikan sebuah sosialisasi awal individu untuk menyesuaikan dirinya dengan penafsiran-penafsiran yang ada dalam proses internalisasi. Kedua, sosialisasi skunder sebuah proses yang mengimbas individu yang sudah disosialisasikan kedalam sektor-sektor baru dunia obyektif masyarakatnya.

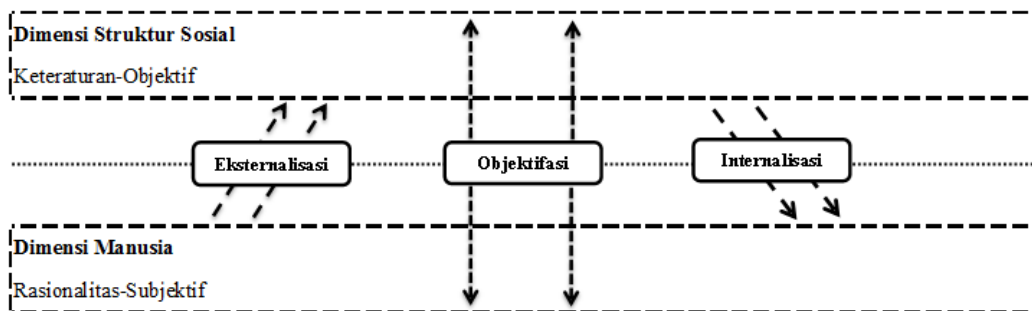
Ketiga, Obyektifikasi, adalah sebuah proses membenaran atau pengakuan terhadap diri seseorang atau kelompok. Jika orang lain pada umumnya sudah terwujud dalam kesadaran, maka terbentuklah suatu hubungan yang simetris antara kenyataan subyektif dan obyektif, dengan kata lain yang nyata diluar sesuai dengan yang nyata didalam. Kenyataan obyektif dengan mudah dapat diterjemahkan kedalam kenyataan subyektif, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa simetri antara kenyataan obyektif dengan obyektif tidak bisa sempurna. Tidak ada individu yang menginternalisasikan kesadaran individu secara keseluruhan dari apa yang diobyektifikasi sebagai kenyataan dalam masyarakatnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 186-187

<sup>9</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 192

Gambar  
Tiga Momentum Pembentukan Masyarakat



## Fenomenologi

Proses bagaimana manusia membangun dunianya dijelaskan oleh Alfred Schutz, murid dari Edmund Husserl, melalui proses pemaknaan. Proses pemaknaan itu berawal dari arus pengalaman (*stream of experience*) yang berkesinambungan yang diterima oleh panca indera. Fenomenologi menempatkan peran individu sebagai pemberi makna. Pemaknaan yang berbuntut pada tindakan ini didasari oleh pengalaman keseharian yang bersifat intersubjektif. Dari pemikiran seperti itulah maka muncul tradisi Interaksionisme Simbolik. Schutz (1967) beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna.<sup>10</sup>

Dengan demikian, fenomena yang ditampilkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transdental dan pemahaman tentang makna atau *verstehen* tersebut.<sup>11</sup> Pemahaman makna tindakan dengan pendekatan

<sup>10</sup> Alfred Schütz. *The Phenomenology of the Social World*. (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1967)

<sup>11</sup> Finn Collin. *Social Reality* (London and New York: Routledge, 1997) 110-114. Lihat juga Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory* (London: Sage Publications, 1994) 32-33. Dan



*verstehen* mendapat koreksi dari Alfred Schutz. Menurut Schutz, tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain, sebelum masuk pada tataran *in order to motive*, menurut Schutz, ada tahapan *because motive* yang mendahuluinya.<sup>12</sup>

Schutz menyadari bahwa substansi mengenai kesadaran seseorang tidak mungkin sepenuhnya bersifat umum atau universal maupun sepenuhnya unik. Dalam buku yang diselesaikan oleh mahasiswanya, Thomas Luckmann, setelah kematian Schutz menegaskan bahwa akumulasi pengetahuan seseorang “dikondisikan secara sosial” dan merupakan suatu hasil dari proses “sosialisasi”. Dengan demikian setiap kebudayaan dan sub-kultur akan memiliki akumulasi pengetahuannya masing-masing. Akan tetapi Schutz menyadari bahwa jika substansi kesadaran seseorang sepenuhnya unik, maka setiap orang akan terjebak dalam dunia pribadinya masing-masing; itu tidak akan mungkin saling memahami atau mengoordinasikan aktivitas-aktivitas kita.<sup>13</sup>

Schutz mengakui bahwa kekuatan penggerak di balik bekerja (*working*) di dunia ini (yaitu konstruksi sosial mengenai realitas) adalah rasa takut kita akan kematian yang disebutnya “kegelisahan mendasar (*fundamental anxiety*)”. Secara individual maupun kolektif, manusia tahu bahwa waktu mereka akan habis. Maka, yang unik pada pengalaman manusia adalah satu kesadaran diri dari tiap-tiap orang akan kematiannya sendiri. Waktu adalah suatu konsep penting yang tak dapat dibandingkan bagi Husserl dan Bergson, juga bagi James, Dewey, dan Mead. Dengan menggabungkan alur-alur kajian ini, Schutz menjadikan waktu sebagai isu sentral dalam karyanya sendiri. Seperti Husserl dan Bergson, dia membedakan antara *durée* (yaitu pengalaman batiniah kita tentang durasi waktu) dan “waktu objektif atau kosmik”. Dan seperti para pragmatis, dia menggunakan perbedaan itu sebagai salah satu batu loncatan untuk analisisnya tentang “struktur waktu yang ada pada *self*”.<sup>14</sup>

---

juga Tom Campbell, *Seven Theories Of Human Society*, Alih bahasa Budi Hardiman, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan (Yogyakarta: Kanisius, 1994) 234

<sup>12</sup> Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory* (London: Sage Publications, 1994) 34-35

<sup>13</sup> Alfred Schutz & Thomas Luckmann. *The structures of the life-world* (Vol. 1). (northwestern university press, 1973) 243.

<sup>14</sup> Alfred Schütz. *On Phenomenology and Social Relation*. (Chicago : The University of Chicago Press, 1962) 218-228

Akan tetapi, analisisnya tentang beragam realitas dan unsur-unsur pembentuknyalah yang merupakan sumbangan terbesar Schutz. Jika “karakteristik dasar yang membentuk [tiap-tiap] gaya kognitif” berbeda satu sama lain, maka menurut Schutz, kita harus bisa menentukan ranah-ranah pengalaman sebagai suatu kombinasi tertentu dari sejumlah sifat atau atribut. Schutz mengidentifikasi enam sifat atau atribut di antaranya. Masing-masing wilayah terbatas memiliki: (1) Ketegangan-ketegangan tegangan kesadaran tertentu”; (2) “suatu *epoché* tertentu”; (3) “se bentuk spontinitas yang berlaku”; (4) “satu bentuk tertentu diri sendiri yang mengalami”; (5) “Satu bentuk sosialitas tertentu”; dan (6) “satu perspektif-waktu tertentu”<sup>15</sup>.

Sebagai seorang sosiolog, Schutz menyampaikan lebih banyak hal tentang metode-metode penelitian ketimbang Husserl, tetapi komentar-komentarnya yang sangat beragam itu lebih bersifat sugestif ketimbang definitif. Misalnya, ada pernyataannya yang mengatakan bahwa komunikasi dua arah (*mutual communication*) dimaksimalkan selama dalam interaksi “tatap muka”. Atau sesuatu yang disebutnya dengan istilah “hubungan-kita (*We-relation*)”. Sekilas ini seperti dukungan atau pengakuan terhadap etnografi, tetapi Schutz tidak pernah terang-terangan alam hal itu.<sup>16</sup> Dengan mengulang pernyataan Husserl, Schutz justru mendukung *epoché* fenomenologi: “penundaan keyakinan kita pada realitas dunia sebagai suatu alat untuk mengatasi sikap alamiah”.<sup>17</sup>

## **Kiai**

Secara Etimologi, kata Kiai yang telah melekat bukan berasal dari bahasa arab melainkan dari bahasa Jawa. Bagi masyarakat Jawa sendiri, istilah Kiai digunakan untuk menyebut benda-benda yang dianggap memiliki keistimewaan, yang kemudian dikeramatkan dan dituahkan, seperti keris, tombak, dan benda-benda lain yang diyakini memiliki keistimewaan tersendiri (Dhofier, 1982:55).<sup>18</sup>

Secara lebih jauh Dhofier menjelaskan bahwa terdapat 3 pilar dalam kategorisasi Kiai, yaitu yang *pertama*, Kiai sebutan untuk benda-benda pusaka atau barang terhormat. Salah satu contoh Kiai pleret gelar untuk nama sebuah tombak dari Keraton Surakarta. *Kedua*, Kiai yang ditujukan kepada gelar orang tua atau tokoh masyarakat. Gelar ini melekat terkait dengan posisinya sebagai

---

<sup>15</sup> Alfred Schütz. On Phenomenology, 230

<sup>16</sup> Alfred Schütz. On Phenomenology, 220

<sup>17</sup> Alfred Schütz. On Phenomenology, 229

<sup>18</sup> Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 55

figur yang terhormat di mata masyarakat. Jadi, gelar ini diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada sang tokoh. Gelar Kiai ini biasanya disingkat menjadi “Ki”. Transfigurasi dari gelar Kiai menjadi “Ki” ini berasal dari tradisi kerajaan Jawa di masa lalu dimana masyarakat Jawa cukup akrab dengan gelar semacam Ki Ageng, Ki Temanggung, dan lain-lain.

Kiai ditujukan sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli dalam ilmu-ilmu agama Islam. Di samping itu, seorang Kiai juga harus memiliki pondok pesantren serta mengajarkan kitab kuning kepada para santrinya. Imam Suprayogo dalam penelitiannya di Kabupaten Pamekasan menemukan adanya 3 istilah Kiai dalam masyarakat Madura:<sup>19</sup>

1. Kiai diartikan sebagai figur pemimpin pondok pesantren. Status ini didapat karena keturunan (*ascribed status*). Penyandanginya adalah seorang keturunan Kiai (anak, saudara kandung, ipar, menantu) yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama dan menjadi tokoh masyarakat serta fatwa-fatwanya selalu diperhatikan.
2. Kiai diartikan sebagai tokoh masyarakat berpengetahuan keagamaan. Kiai tipe ini tidak menjadi pemimpin namun seringkali mengadakan pertemuan dengan Kiai pemimpin pondok pesantren. Kebanyakan dari mereka adalah alumni pondok pesantren itu atau ada beberapa diantaranya yang merupakan keturunan Kiai. Sama halnya dengan Kiai tipe I, mereka menjadi panutan masyarakat dan ide-idenya seringkali menjadi keputusan desa. Kedudukan ini diperoleh dengan usaha (*achieved status*).
3. Kiai diartikan sebagai guru mengaji disurau (Musholla), sebenarnya, mereka tidak harus tokoh masyarakat yang dimintai pendapat, akan tetapi hanyalah orang-orang yang mempunyai beberapa santri untuk belajar Al-qur'an. Disamping itu mereka sebagai imam di surau.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi. Dalam metode ini akan tergambar seseorang atau masyarakat, latar pengamatan, pembicaraan secara factual dan tindakan yang diamati, di dengar, di lihat serta dicatat lengkap mungkin dengan suatu uraian yang sangat terperinci dan lengkap. Dalam persepektif fenomenologi tersebut dapat

---

<sup>19</sup> Imam Suprayogo., *Kiai Dan Politik*. (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

diperoleh dalam penafsiran dan pemahaman tentang makna yang lebih mendalam dan suatu kenyataan yang relevan. Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat diskriptif yakni data yang dikumpulkan banyak terdiri dari kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.<sup>20</sup> Fenomenologi dijadikan sebuah kerangka berfikir untuk melakukan penelitian ini menggunakan alat yang disebut dengan *vestehen* untuk menggambarkan secara detail tentang bagaimana kesadaran itu berjalan dengan sendirinya. Dalam melakukan *vestehen*, seseorang peneliti harus masuk dalam pikiran subjek sebuah penelitian. Peneliti merekam kondisi sosial atau realitas sosial yang ada dalam masyarakat sehingga memungkinkan peneliti mendemonstrasikan tentang cara yang dilakukan oleh informan.

Data yang bersumber dari lapangan, oleh peneliti dikelompokkan sebagai data primer (data utama). Data dari lapangan ini diperoleh melalui pengamatan maupun wawancara mendalam. Pengamatan dilakukan berulang – ulang, selain guna menemukan hal yang sangat konsisten, juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kriterianya realibilitas data (tepatnya pada triangulasi data ). Sedangkan informan yang diwawancarai adalah 1. Tokoh Masyarakat, 2. Kiai 3. Santri (alumni) dan Masyarakat umum Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari hingga oktober 2019 bersamaan dengan proses pemilihan presiden dan legislatif di tingkat pusat sampai daerah.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam dengan informan kunci, yaitu dengan orang yang benar-benar memahami pola konstruksi sosial terhadap Kiai yang berpolitik praktis atau unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi kepesantrenan dan mengetahui suatu objek dalam penelitian. setelah melakukan wawancara data dimulai dengan membuat transkrip wawancara, dengan cara mengulang kembali hasil dari rekaman wawancara, dengan mendengarkan secara sesama, kemudian menulis data yang sesuai dengan apa yang ada dalam rekaman. Setelah penulis hasil wawancara yang ada pada transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara teliti dan cermat serta berhati-hati kemudian dilakukan reduksi data.

Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil data dan mencatat informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian agar dapat menyimpulkan inti sari penelitian, tetapi bahasanya sesuai dengan informan. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong. “Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi”. (Bandung: Penerbit PT.Remaja Rosdakarya, 2006) 19.

ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya data-data yang diperoleh, dikumpulkan kemudian di klasifikasi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan guna memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana konstruksi sosial tokoh masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik praktis dan terbentuknya frem sosial dalam pola konstruksi atau unsur-unsur yang terdapat dalam budaya politik Kiai. Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah melalui beberapa tahap.

Proses pengklasifikasian untuk mencari persamaan dan perbedaan kategori atau variasi yang ada, guna memperoleh data yang lebih signifikan. Dalam langkah yang pertama ini akan di tentukan tema-tema dari ide mengenai proses bagaimana tokoh masyarakat mengkonstruksi tradisi pola prilaku politik Kiai dan terbentuknya frem pemikran dalam tradisi politik praktis Kiai serta pemakaian simbol- simbol dalam keagamaan tersebut. Tahap kedua adalah proses penghubungan hasil hasil klasifikasi tersebut Dengan referensi – referensi atau teori yang berlaku atau berhubungan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam upaya memahami konstruksi sosial tentang politik praktis Kiai pada tokoh masyarakat di kabupaten Bangkalan, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann. Kehidupan sehari-hari menurut mereka menyimpan serta menyediakan realitas dan juga pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Dalam hal ini kehidupan sehari-hari tampil sebagai realitas objektif yang kemudian ditafsir oleh individu sehingga sekaligus memiliki makna secara subjektif.

Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu dengan demikian melakukan produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam dunia sosialnya. Tokoh Masyarakat dengan pengetahuan yang dimilikinya menjadi penentu dalam mengkonstruksi makna Politik praktis Kiai. Pemahaman tentang politik praktis Kiai dalam kenyataannya merupakan hasil produksi sekaligus reproduksi dari politik praktis Kiai.

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya. Dalam hal ini adalah makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann dalam melihat hubungan antara manusia dan masyarakat lebih mengedepankan pandangan

dialektik. Menurut mereka, manusia di satu sisi menciptakan masyarakat dan di sisi lain masyarakat juga menciptakan manusia. Dengan kata lain masyarakat menurut Berger harus dipahami sebagai realitas objektif sekaligus realitas subjektif. Dialektika antara manusia dengan masyarakat dijelaskan oleh Berger terjadi dalam tiga momentum yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>21</sup>

Pengetahuan tokoh masyarakat tentang politik praktis Kiai yang sudah berlangsung turun temurun menyatakan bahwa politik praktis Kiai bukan merupakan hal yang salah. Kehidupan masa lalu tokoh masyarakat tidak jauh dari perpolitikan yang dilakukan oleh para Kiai, menjadikan realitas mereka akan lebih mementingkan pola tingkah laku sehari-hari dari pada keberadaannya. Kesulitan ekonomi seringkali menjadikan faktor utama sebagai beban bagi keluarga tokoh masyarakat di samping pemenuhan kebutuhan hidup.

Meski pada awalnya masyarakat Bangkalan secara umum menerima dan mengakui pernyataan tersebut, namun seiring dengan berjalannya waktu tidak semua masyarakat Bangkalan mengamini pernyataan tersebut, termasuk para tokoh masyarakat. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya pengaruh informasi dan pengalaman yang diperoleh masing-masing tokoh masyarakat terkait dengan politik praktis Kiai.

Selanjutnya akan diidentifikasi lebih detail mengenai dialektika yang terjadi di antara ketiga momen di atas, sehingga membentuk konstruksi sosial tokoh masyarakat Bangkalan Madura terhadap Kiai yang berpolitik praktis. Dialektika tersebut juga sekaligus menjelaskan pengetahuan sebagai realitas objektif sekaligus realitas subjektif. Dalam pembahasan ini diuraikan analisis sesuai dengan permasalahan dan tentang fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian dengan kaitannya dalam teori yang telah diajukan. Penelitian ini dilakukan terhadap tokoh masyarakat yang mengkonstruksi Kiai terjun di dunia politik praktis di Kabupaten Bangkalan.

Setidaknya ada dua faktor utama yang mendukung kenapa Kiai mempunyai tempat terhormat dalam pandangan masyarakat Bangkalan secara umum. *Pertama*, Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas, khususnya ilmu Agama sehingga penduduk (desa) belajar pengetahuan kepadanya. Pengetahuan yang luas tentang Islam menyebabkan Kiai selalu mempunyai pengikut, baik pengikut yang secara informal senantiasa menghadiri ceramahnya atau pengajiannya maupun para santri yang tinggal di pondok pesantren yang

---

<sup>21</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 192

dipimpinnya. *Kedua*, Kiai biasanya berasal dari keluarga berada, meskipun tidak jarang ditemukan Kiai yang miskin pada saat baru memulai mengajarkan Islam.

Kiai, dengan demikian merupakan salah satu elit yang memiliki posisi strategis. karena selain ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang Islam, juga karena sebagai pemilik pondok pesantren yang senantiasa mampu mewarnai masyarakat sekitarnya. bila dibandingkan dengan elit lokal yang lain, petani kaya misalnya Kiai khususnya yang memimpin pondok pesantren mempunyai posisi yang lebih terhormat. Lebih dari itu, secara teologis Kiai juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*waratsat al-anbiya'*) fungsi ini sebetulnya berasal dari struktur hierarkis kewenangan individu dalam menafsirkan kitab suci dan dipandang sebagai sosok yang paling punya kapasitas untuk itu. Melalui pemahaman dan pengalaman sumber-sumber Islam Al-Quran dan Hadist, Kiai bertugas memberikan bimbingan guna mengatasi berbagai problem yang tidak hanya terbatas pada masalah spritual, tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas. Pada titik inilah peran strategis Kiai dapat dilihat terutama dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia. keterlibatannya secara langsung di dunia politik menjadi salah satu aspek penting dari figur seorang Kiai sebagai pemimpin di masyarakat.

Jika dilihat dari sisi peran, Kiai memegang peran ganda. satu sisi sebagai tokoh agama (pemimpin pondok pesantren) yang meliputi peran spritual, pendidikan, agent of change dan sosial budaya. Di sisi yang lain, dia berperan sebagai figur yang terlibat dalam dunia politik, baik sebagai partisipan maupun sebagai aktor. Hal yang demikian telah terjadi dan menjadikannya sebagai pemimpin di masyarakat yang tidak hanya terbatas pada wilayah agama, tetapi meluas pada wilayah politik. Kiai tidak hanya menjadi basis kekuatan moral keagamaan, melainkan juga sebagai kekuatan politik dalam struktur kekuasaan negara. Kendati demikian, keterlibatan Kiai dalam kekuatan politik dinilai acapkali memiliki implikasi yang tidak selalu menguntungkan. seperti yang terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu informan, sebagai berikut:

*"kepemimpinan Kiai masih mempunyai pengaruh di masyarakat Bangkalan, utamanya dalam aspek beragama. tetapi, kepemimpinan Kiai ini sudah terkontaminasi dengan kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih menguntungkan ketika Kiai terlibat dengan dunia politik praktis"*

## ***Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis***

*“kepemimpinan keyaeh nikah ke’ benyak epangaruh dhek masyarakat pengkalan, utama epon delem aspek akemah, tapeh kepemimpinan keyaeh samangken ampon cambur kalaben kapentingan pribadi otabel akompol se lebbi anguntungaki Keyaeh neng dunia politik”*

Bagi masyarakat Bangkalan, khususnya warga *nahdliyin* kedudukan Kiai sebagai tokoh agama sampai saat ini masih memiliki arti penting. Kholifi Aziz salah satu informan yang sehari-hari sebagai tokoh masyarakat di kecamatan arosbaya mengatakan bahwa “Kiai akan tetap menjadi panutan bagi masyarakat selama ia menyandang predikat Kiai”. pandangan ini bisa dipahami karena Kiai sebagai pemimpin yang memiliki kharisma diyakini sebagai pemegang kekuasaan suci yang pada gilirannya membuatnya sangat berbeda dari masyarakat pada umumnya. potret otoritas keagamaan yang begitu kuat ini tidak sebanding ketika Kiai terlibat di dunia politik. seperti yang ditegaskan oleh tokoh masyarakat, Imron Rosyadi, bahwa :

*“kepemimpinan Kiai sampai sekarang masih menjadi panutan masyarakat Bangkalan, terutama Kiai-Kiai di kampung yang mempunyai pondok pesantren lebih lagi seorang Kiai yang bersifat netral terhadap porpol yang ada. memang harus diakui bahwa pengaruh Kiai dalam agama masih kuat sampai sekarang, tetapi dalam aspek politik tidak karena kekuatan Kiai terpecah belah”*

*“kepemimpinan Keyaeh sampek sateyah kee dbeddeh toro’an masyarakat pengkalan, utama epon keyaeh-keyaeh se neng desah se andhek pondhukun napah pole keyaeh se netral dhek porpol sebedeh. saonggunah pengaruh Keyaeh nekah sampek mangken sajen koat tapeh dhelem politik aca pecca”*

Suatu hal penting yang harus dikemukakan adalah fenomena kedekatan Kiai dengan politik yang sering memunculkan gesekan di masyarakat Bangkalan. hal ini disebabkan karena keterlibatan Kiai dengan politik dipandang terlalu mengedepankan orientasi politik yang kemudian dikemas dalam bentuk kepentingan kekuasaan. seperti yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Amin Imron pada kesempatan terhadap penulis, mengatakan bahwa:

*“ tidak harus politik itu dikaitkan dengan kekuasaan.tetapi di pengalaman kita akhir-akhir ini politik sering diidentik dengan penguasa. artinya seorang Kiai ketika menjabat sebagai figur politik. ujung-ujungnya adalah kekuasaan. hal ini terjadi di Kabupaten Bangkalan katakanlah bupati (Bangkalan saat ini Makmun Ibnu Fuad ) yang merupakan keluarga besar bani Kholil yang menjabat di pemerintahan ya bukan Kiai menurut saya, jauh dari nilai-nilai seorang Kiai”*

*“ politik nekah tak harus e kait aki sareng kekuasaan, tapeh dherek pangalaman zaman samangken, politik nekah etandbeeh ben kekuasaan, arteh epon Keyaeh manabei ajabat reng*



*politik, dhebu dhinah pakkun kakuasaan. nekah katettiye neng kabupaten pengkalan kaentoh bupati mangken Makmun Ibnu Fuad se aropaaki katoronan dhrebhani Kholil se tojuk yeh benne Keyaeh, mun tang pendapat nekah jeuh dhebreh nilai-nilai Keyaeh”*

Pandangan Amin Imron di atas sejalan dengan informan yang lain, Hotib Marzuki. Menurutnya politik tidak hanya sebatas identik dengan kekuasaan, tetapi yang lebih penting politik itu adalah masalah *aqidah*. Aqidah tersebut harus ditegakkan melalui instrumen politik yaitu partai politik. dengan demikian Kiai menjadi penting untuk tidak mengatakan wajib hukumnya untuk terlibat di dunia politik praktis demi tegaknya aqidah tersebut. karena, wajah politik yang tampak saat ini seringkali mengabaikan dimensi aqidah yang berhaluan *ablussunnah wall jama’ah*. hal ini dikemukakan secara lengkap bahwa :

*“ memang politik itu yang dimaksud bukan hanya sosial ekonomi saja, tapi juga masalah aqidah. ada partai-partai tertentu itu sudah dimasuki aqidah-aqidah ablissunnah wall jama’ah. itu kan berbahaya. bahkan diluar partai banyak ajaran-ajaran yang sekarang dilarang. itukan kalau tidak Kiai masuk partai, kekuatan politiknya berkurang. tapi kalau Kiai masuk dan mempunyai partai atau punya payung, kan jadi kuat”*

*“saestonah politek se emaksud benne karo sosial ekonomi peih, tapeh maslah aqidah pole. bedeh partai-partai se ampon kamasoen aqidah-aqidah ablussunnah wall jama’ah, nekah kan korang sae. tor juken neng luar ampon bennyak ajeren-ajeren se ampon elarang. nekah kan lang kong sae Keyaeh masuk partai, kakuotannah ngurangan. tapeh manabie Keyaeh masuk ben ngaandhek partai ataubeh tekeuwen, kan lebbi kuat”*

Pandangan yang hampir sama dengan Hotib Marzuki tentang keharusan keterlibatan Kiai di dunia politik adalah Imron Rosadi. seperti yang dituturkan kepada penulis pada suatu kesempatan wawancara mengatakan bahwa:

*“ memang seharusnya Kiai sekarang terlibat dalam dunia politik praktis. jika Kiai memiliki visi membangun dan misi perjuangan, maka terlibat dalam dunia politik akan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya visi dan misinya. karena bagaimanapun juga kebijakan politik akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat Bangkalan”*

*“saestonah ampon wektonah Keyaeh samangken ompon turun langsung dhek dunia politik praktis, Keyaeh kedhwen visi abangun ben misi ajuang, makah acampurrah Keyaeh sanget rajeh manfaattah dhek ajelennah visi misi epon, karnah katenapah epon kebijakan politik sanget apangaruh dhek tatanan kaodhe’en masyarkat Pengkalan”*

Bahkan, keterlibatan Kiai di dunia politik praktis justru akan memperluas sasaran dakwahnya, dan pondok pesantren cenderung lebih cepat maju karena mendapat lebih banyak dukungan dari pemerintah. tetapi harus di catat pula kata Mat Holla salah seorang informan yang dulu pernah menjadi

kepala desa turin timur Kokop selama dua kali periode, Kiai yang terlibat di politik praktis harus mengedepankan kepentingan ummat. keterlibatan Kiai di dunia politik boleh – boleh saja selama bisa membawa dan menjadikan kesejahteraan ummat atau masyarakat Kabupaten Bangkalan menjadi lebih baik.

Realitasnya, Kiai yang terlibat di dunia politik praktis seringkali membawa dampak bagi tradisionalitas dunia pondok pesantren yang sebagian besar berada di basis-basis pedesaan. Tugas Kiai yang menjaga *mainsream* paham *ablussunnah wall jama'ah* melalui pondok pesantren menjadi tidak terurus dengan sungguh-sungguh, bahkan tugas utamanya untuk mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah menjadi terabaikan karena terlalu terfokus dengan persoalan politik praktis yang ujung-ujungnya berorientasi pada kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Musaffaq, bahwa:

*“menurut saya, dengan terjunnya di dunia politik praktis tentu mengganggu tugas utamanya yang seharusnya beliau memberikan wejangan-wejangan, memberikan ilmu dan sebagainya. Bagi santri-santrinya tentu semakin terganggu. Seorang Kiai akan jarang bertatap muka dengan para santrinya karena seringkali Kiai mengurus politik”*

*“pendapat teng kuleh tentang acampurrah Keyaeh dhek politik praktis kaentoh aganggu tugas se paling utama epon se saestonah aberre’ wejangan, nyebbar aki elmunah ben lain samacemmah. kaanggy santrenah nyatah aganggu, Keyaeh ka’dentoh tak apangge kalaben santrenah amarkedh sibuk ngurusin politik praktis”*

Kekawatiran Musaffaq juga menjadi kekawatiran Muhammad. salah satu alumni pondok pesantren tersebut mengatakan, Keterlibatan Kiai di dunia politik praktis tidak hanya membuat Kiai tidak punya waktu untuk mengurus pondok pesantrennya, justru santri mereka terbengkalai. *no time whithout politic*. bisa dipastikan politik juga tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan. Hal ini membuat Musa tidak setuju apabila Kiai terlibat di dunia politik praktis karena terkesan membingungkan dan tidak konsisten dengan kaidah-kaidah yang sudah ada dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadist.

Akibat yang muncul kemudian adalah semakin terkikisnya karisma yang dimiliki Kiai, sulit dibayangkan bagaimana kalau pamor Kiai di mata masyarakat Bangkalan semakin hilang dan masyarakat Bangkalan tidak lagi menghormatinya. Seperti yang dituturkan oleh Suja'i bahwa “ saat ini Kiai sudah mengalami degradasi ketokohan karena masyarakat Bangkalan melihat bahwa Kiai sudah plin plan sebab sering ganti-ganti partai dan cenderung komersial, begitu juga yang di katakan oleh Muhammad bahwa:

*“karisma seorang Kiai di era sekarang ini kelihatannya semakin mundur, karena menurut pandangan Kiai benar belum tentu ummat membenarkannya. kalau sebelum reformasi masyarakat Bangkalan pada umumnya selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah Kiai, namun sekarang tidak lagi. kelihatannya masyarakat semakin cerdas”*

*“karisma Keyaeh jeman mangken nekah eabas aki jen mundur, karnah menurut pangbesen teng kuleh Keyaeh pendher ke tak pasteh masyarakat nekah apendher aki. engkie mun ki’ sabellunnah jeman reformasi masyarakat pengkalan nekah langsung endhek ben atoaat dhek parentanah Keyaeh, namung samangken kaintoh masyarakat ampon cerdas kappe”*

Fenomena kredibilitas Kiai yang cenderung mengalami penurunan, menurut pandangan Imam Mukhlis dikarenakan beberapa faktor. *Pertama*, sebagian Kiai dan pesantren terjun dalam kanca politik praktis. *Kedua*, agama dijadikan alat dalam meraih kepentingan. *Ketiga*, tidak konsisten dengan visi awal yang diamanatkan, dengan berbagai faktor ini Kiai cenderung tidak lagi dihormati bahkan menjadi kecaman dalam masyarakat Bangkalan. “Yang salah siapa”, Kiai kug gak bisa jadi Kiai.

Bila dilihat dari perilaku bebas berdemokrasi, fenomena menurunnya kredibilitas Kiai di masyarakat Bangkalan dapat dilihat dari dua faktor. *Pertama*, faktor internal yang dapat dipengaruhi oleh rekam jejak Kiai dan *Kedua*, faktor eksternal yang disebabkan akibat lunturnya kharisma Kiai dimata masyarakat Bangkalan dan juga termasuk santri-santrinya. Karena itu menurut Dullatip bahwa menguat atau tidaknya kharisma Kiai sangat tergantung pada kepribadian Kiai, bukan pada ketokohnya. Jika dilihat dari ketokohnya kharisma Kiai tetap dan tidak berubah, akan mengalami penguatan atau degradasi sangat bergantung pada pribadi Kiai itu sendiri bukan ketokohnya.

Kecenderungan yang muncul ketika kharisma Kiai mulai terkikis, Kiai tidak lagi menjadi tokoh tunggal yang mempengaruhi sikap politik masyarakat Bangkalan, bahkan masyarakat Bangkalan cenderung mencari akses informasi untuk dijadikan pertimbangan-pertimbangan sebelum mereka memutuskan memilih partai politik yang mana atau memilih siapa. Hal ini ditegaskan oleh Imron Rosyadi bahwa :

*“Referensi seorang Kiai hanyalah sebagai satu bahan pertimbangan. Dukungan saya tetap pada pertimbangan pribadi. Pertimbangan pribadi bagi saya adalah keputusan yang diolah dari berbagai referensi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan”*

*“referensi Keyaeh hanya ekebey bahan pertimbangan, teng kuleh adukung dhek pertimbangannah thebik. pertembangan dhebik tengkuleh enki kak dentoh keputusannah se eperrek tor ecampor kalaben referensi dhereb pertimbangan”*

Dengan faktor-faktor ketokohan Kiai yang kredibilitasnya mulai menurun akibat pandangan politik praktis yang terlalu berorientasi kekuasaan, maka hampir semua informan penelitian sepakat untuk menggunakan pertimbangan pribadi sebagai kata akhir dalam menentukan politik praktis. Seperti yang dikatakan Musaffaq, dalam menentukan pilihan politik praktis saya berdasarkan pertimbangan pribadi. Jika menurut kita bagus ya kita pilih, toh referensi seorang Kiai juga tidak selalu benar kok. Melihat karakteristik hubungan antara masyarakat dengan Pesantren, Masyarakat dengan Kiai, maka konsepsi Berger tentang konstruksi realitas sosial digunakan dalam kajian ini. Realitas sosial yang dipotret melalui konstruksi sosial ini adalah pemahaman masyarakat tentang perilaku Kiai dalam dinamika politik praktis lokal khususnya pasca orde baru.

Eksternalisasi merupakan proses paling awal munculnya konstruksi sosial. pada proses ini, seseorang mengalami momen adaptasi dirinya dengan dunia sosio-kulturnya. proses eksternalisasi yang paling mendasar adalah bagaimana individu masyarakat atau subjek dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi dengan teks-teks kehidupan, baik yang bersifat abstrak maupun konkrit. sarana yang digunakan dalam momen ini adalah bahasa dan tindakan. bahasa dan tindakan digunakan untuk menyesuaikan dengan dunia di luar dirinya. Secara konseptual, proses eksternalisasi berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik praktis dapat digambarkan sebagaimana uraian. *Pertama*, mengacu pada nilai agama dengan menyesuaikan teks-teks suci. ungkapan –ungkapan dalam nilai agama dapat digunakan sebagai pijakan untuk memberikan legitimasi pemahaman masyarakat tentang suatu tindakan politik Kiai. segala gagasan tentang apa yang hendak dikerjakan sesuai dengan perannya sebagai Kiai yang terjun di dunia politik praktis disesuaikan dengan pedoman perilaku dan akhlak yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Penjelasan tentang posisi Kiai yang berpolitik sebagai ulama terdapat dalam surat al-Fathir ayat 28: “Sesungguhnya yang takut kepada ALLAH di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama.” Begitu juga dengan salah satu hadis: “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi.” sekalipun dalam batasan yang sulit ditegaskan, tetapi ungkapan menjadi “Kiai yang berpolitik praktis harus memberi manfaat bagi ummat. merupakan ungkapan yang pijakannya di dalam teks suci yang dimaksud.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Mat Sirat bahwa:

*“mengikuti Kiai dalam urusan politik praktis tidak secara otomatis mendapatkan garansi yang benar, bahkan masyarakat Bangkalan lebih membutuhkan kemanfaatan untuk kebaikan hidup sosial ekonominya”*

*“norok Keyaeh nekah dbelem urusan politik praktis tak spanton olle jaminan bendher, estonah masyarakat pengkalan lebbi aputoh aki manfaat kaangkuy kaodhe'en lebbi sae sosial tor juken ekonominah”*

Standar moral untuk selalu berfikir dan bertindak demi kesejahteraan rakyat dan demi kebaikan bersama, tentu juga merupakan ajaran yang sudah ada sejak periode Nabi Muhammad SAW. berbagai rujukan tekstual tentang perilaku dan perkataan dari kesejarahan Nabi. Kemudahan ini karena memang Nabi sudah mengajarkan dan memberi contoh perilaku politik yang baik beliau memerintah di Madinah. Nilai agama yang menjadi pijakan tindakan politik dan dipakai untuk melegitimasi tindakan tersebut biasanya mengacu dari Nabi Muhammad SAW ketika mendirikan tatanan sosial politik di Madinah, dalam bentuk piagam Madinah. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Ada dua alasan bagi kehidupan bernegara yang di atur dalam Piagam Madinah, pertama, seluruh pemeluk agama Islam adalah ummat (nation) walaupun mereka berbeda suku. kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.

Secara strategis piagam ini juga bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dengan mengembangkan toleransi sosio-religius secara luas. Kedua, penyesuaian dengan tradisi lama. dalam perpolitikan di Indonesia, terdapat perilaku yang secara politik telah terkonstruksi sesuai dengan fase orde yang berjalan. ketika pemerintahan orde lama tentu pemahaman masyarakat akan berbeda dengan pemahaman masyarakat orde baru, dan begitu pula dengan pemahaman masyarakat orde reformasi. masing-masing fase ini memiliki keunggulan yang dapat dipakai sebagai rujukan pemahaman. Penyesuaian dengan nilai-nilai lama ini berproses melalui kebiasaan yang masih berjalan pada sebagai anggota masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Hasani Zubair bahwa:

*“pada dasarnya perbedaan itu hikmah dan wajar. Jadi hal tersebut harus disikapi dengan biasa saja, lebih bagus lagi kalau setiap individu masyarakat Bangkalan berani untuk menentukan pilihannya sendiri”*

## ***Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis***

*“dbesar epon thepideh nelah hikmah tor wajar peih. tedheb kepanekah kothuh sikapen boasah peih, lebbi begus pole dbek satejbenah oreng Pengkalan berani kaangkuy nentuaki pele’ennah”*

Dunia pesantren selama ini dipahami sebagai dunia yang terpisah dari politik praktis. sebuah dunia yang berada di balik tembok pesantren yang hanya mendalami berbagai soal agama Islam. tentu keadaan ini menjadi sesuatu yang memerlukan penyesuaian bagi Kiai atau komponen pesantren lainnya ketika ia memasuki dunia politik. Penyesuaian-penyesuaian dengan demikian menjadi hal yang harus dilakukan untuk kelancaran tugas politiknya nanti. Di dalam moment objektivasi, tindakan sosial seolah-olah berada di luar diri manusia. tindakan sosial Weber ini membentuk jaringan proses pelebagaan atau institusionalisasi. proses objektivasi dalam kaitan ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

*Pertama*, Kiai, Pesantren, dan masyarakat adalah tiga entitas yang berbeda. begitu juga tentang masyarakat, pesantren yang menyediakan latar kulturnya, dan Kiai sebagai figur yang diteladani. Dari persefektif masyarakat, pesantren dan Kiai adalah entitas yang berhadapan dengannya dalam proses objektivasi. Pasantren adan Kiai adalah dunia sosial sebagai tindakan sosial. dialog *intersubjektif* antara masyarakat dengan tindakan sosial di luar dirinya sangat memungkinkan terjadinya makna – makna baru. makna itu sebagai hasil dialog yang terjadi antara dua tindakan yang berakhir dengan integraasi makna-makna yang sebelumnya di anggap sebagai lembaga yang berhadap-hadapan. Perilaku sesuai dengan tradisi pesantren dan di luarnya di anggap sebagai lembaga-lembaga berlainan dengan pilihan politiknya. tanpa disadari bahwa pesantren dan bukan pesantren itu adalah buatan manusia yang berproses menjadi melalui tahapan konstruksi sosial. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena dunia sosial itu sepenuhnya buatan manusia. Dunia pesantren atau dunia sosial di luar pesantren seringkali tidak disadari, bahwa sebagai sesuatu realitas ia akan selalu berusaha memenangkan dialog antara diri masyarakat dengannya.

Moh.Musa mengungkapkan, bahwa :

*“Kiai cenderung dan berani teribat kearah dunia politik ptaktis dan juga membawa santri mereka masing-masing untuk ikut aktif dan terlibat kearah partai politik dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Sehingga kesan yang ada ialah kurang kuatnya persatuan para Kiai dalam menyuarakan kebenaran dan membingungkan masyarakat Bangkalan”*

*“Keyaeh cenderung tor bengal norok dbek urusan politik praktis jukenan ngebeh santrenah kaangkuy norok ben aktif dbek partai politik se thepedheb benderanah. tor juken kesannah*

*korang koutnya persatu'ennah Keyaeh dbelem ajuang aki tor abimbing masyarakat Pengkalan"*

Bisa juga terjadi dialog antara tindakan sosial dengan yang ada di luar diri itu terjadi pula dialaog paham *ablussunnah wall jama'ah* yang menjunjung tinggi nilai-nilai ahklaq dan moralitas dengan paham yang berkembang dalam tindakan sosial politik sebagaimana dipahami dari lingkungan sosialnya. sementara tindakan sosial objektifnya berbanding terbalik dengan yang pada akhirnya menghasilkan makna baru yang merupakan hasil integritas tidakan sosial dan atau hasil penolakan satu realitas.

*Kedua*, pelebagaan atau institusionalisasi yaitu proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. di dalam proses pelebagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini masyarakat Bangkalan melakukan sesuatu tentu tidak hanya berdasarkan atas tindakan berpura-pura, tetepi telah menjadi tindakan yang bertujuan, *meaningfull*. mereka tahu sebenarnya tentang manfaat tindakan sosial bagi dirinya sendiri.

*Ketiga*, habitualisasi atau pembiasaan yaitu proses ketika tindakan sosial bertujuan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. tidak diperlukan lagi berbagai penafsiran terhadap tindakan sosial tersebut telah menjadi bagaian dari sistem kognitif dan evaluatifnya. Peta kesadarannya telah menerima dan sistem evaluasi berasal dari sestem nilai juga telah menjadi bagian di dalam seluruh mekanisme kehidupannya. dengan demikian, ketika suatu tindakan sosial telah menjadi suatu habitual, maka telah menjadi tindakan sosial yang mekanis yang mesti dilakukan begitu saja. dengang melanggengkan basis kekuasaan Kiai-Kiai yang ada Kabupaten Bangkalan.

Hal ini sesuai denga yang dikatakan oleh Imam Bukhori bahwa:

*"dengan terjunnya Kiai di dunia politik praktis, menurut saya tidak selalu memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, mungkin hanya sebagian masyarakat Bangkalan yang dekat dengan Kiai yang kehidupannya semakin baik, namun yang tidak dekat tetap saja"*

*"kalaben noro'en Keyaeh dbeke urusan politik praktis, mun caan ten kuleh lok salan aberrik ka manfaatan ben kasejahteraan dbeke masyarakat Pengkalan, mungkin saos sabegeyen masyarakat Pengkalan se semmak ka Keayeh kaodhe'nah sajen pekus, tapeh se lok semmak pakkun peih"*

## *Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis*

Internalisasi sebuah proses ketika individu melakukan identifikasi diri di dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan miment penarikan relaitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berda dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunai sosio-kulturalnya. Dalam internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. kesadaran masyarakat akan dirinya dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. Struktur objektif akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan melainkan juga menjadi. misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.

Secara kodrati, manusia memiliki kecenderungan hidup berkelompok. disini manusia akan selalu berada dalam kelompok yang kebanyakan didasarkan atas rasa seidentitas. Kesadaran kolektif akan mudah timbul ketika kelompok manusia itu memiliki identitas yang sama. jika warga *nadhliyin* berkumpul dengan sesamanya, maka interaksi antar individu akan cenderung berlangsung secara intensif. begitu juga, ketika sesama Kiai berkumpul, maka interaksi antar individu Kiai akan berlangsung intensif. Dalam kolektivitas NU, warga *nabdhliyin* Bangkalan dapat berinteraksi secara intensif, tetapi hal ini belum tentu terjadi ketika ia berada dalam suatu kolektivitas dengan identitas yang berlainan dengan identitas kultural NU. itulah sebabnya terdapat penggolongan sosial, misalnya dalam organisasi sosial keagamaan masyarakat dikenal adanya Kiai, intelektual, masyarakat dan sebagaimana tergantung pada regulasi yang digunakan. dalam organisasi kultural NU, dikenal adanya kelompok Kiai, santri, masyarakat umum dan lain-lain.

Seperti yang digambarkan oleh salah satu seorang informan yang kini menjadi salah satu anggota dewan di Kabupaten Bangkalan, Kholifi Aziz mengatakan:

*“kalau kaum NU (nadhliyin) di Kabupaten Bangkalan pada umumnya melihat sosok Kiai siapa yang ada di belakang partai tersebut. Kalan Kiai ini yang karismatik betul semuanya sudah hampir 100 persen. masih dari keturunan Bani Kholil, meskipun pakai cara apapun paksaan bagaimanapun tidak akan pernah menang disini. dalam sejarah Bangkalan tidak akan menang”*

*“manabie kuam NU neng kabupaten Pengkalan secara umum ngabes Keyaeh paserah se bedbeh ebudhinah partai kenekah. manabei Keyaeh nekah se karismatik pendher sakappe’ennah 100 persen, ke’ bedbeh katoronan dhereh Bani Kholil, ngangkuyeh cara paksaan epon ke’ korang kareneah pasteh mennang tor juken sajaranah kabupaten Pengkalan pasteh lok kereh mennang”*



Dalam teori Konstruksi sosial, Berger menekankan adanya hubungan dialektika antara realitas sosial objektif dengan ruang kesadaran subjektif, adapun proses dialektika yang terjadi antara realitas sosial objektif dengan ruang kesadaran subjektif yang ditemukan dalam studi ini adalah berupa dialektika antara realitas sosial Kiai di satu pihak dengan kesadaran masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menjadi subjek penelitian di pihak lain. Proses dialektika tersebut tampak adanya pola tertentu, yaitu terjadinya internalisasi dan eksternalisasi. Internalisasi lebih cenderung terjadi ketika ruang kesadaran subjektif masih berada pada posisi Kiai menjadi elit agama dan pemimpin Pesantren. Dalam internalisasi, peran (role) dan identitas (identity) sangat penting. dengan peranan Kiai sebagai pengasuh Pesantren dan identitas Kiai sebagai elit agama, masyarakat sebagai anggota-anggota satu struktur melakukan internalisasi. Masyarakat sendiri terstruktur oleh realitas objektif. kesadaran masyarakat Bangkalan akan dirinya dan dunianya akan terbentuk sesuai dengan peran tadi. struktur objektif akan membuat seseorang tidak hanya sekedar memainkan sebuah peranan melainkan juga menjadi misalnya dalam internalisasi mengenai nilai-nilai keagamaan.

Sedangkan eksternalisasi lebih cenderung terjadi terutama ketika Kiai masuk pada wilayah politik praktis. perbedaan masyarakat dengan Kiai dalam hal politik merupakan proses masyarakat Bangkalan membangun dunia sosial (*build social world*)nya sebagai bagian esensial dari kehidupan politik praktis mereka. Eksternalisasi bagi masyarakat Bangkalan adalah menciptakan struktur politik yang stabil yang diperlukan masyarakat, agar Kiai yang dijadikan panutan memiliki kredibilitas di mata masyarakat Bangkalan. struktur itu sendiri adalah sebuah proses produksi bersama (*a collective production*) yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama.

Realitas seperti ini memiliki dampak yang luar biasa pada masyarakat biasa (bawah) seperti yang dituturkan oleh Hotib Marzuki kepada penulis, bahwa:

*“Kalau masyarakat desa (bawah) itu kan, beda gambar saja kan gitu saling gesekan begitu keras. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu hanya sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Bangkalan sebenarnya. saya yakin sebuah partai politik sama-sama mengklaim memperjuangkan masyarakat Bangkalan, Saya mendukung akan memperjuangkan masyarakat Bangkalan begini begitu maka dukunglah saya dan semuanya itu kan. dan partai politik manapun tidak ada yang salah dan itu benar, kalau salah ya pasti tidak lolos verifikasi KPU kan begitu”*

## ***Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis***

*“manabi masyarakat dhesah kan karo pedeh kemper saos pas saleng atokaran. saestonah masyarakat lok taoh manabi karo bendhe kaangkuy ajuang aki kapentinnah rakyat Pengkalan. kuleh hakeul yakin sadhejenah partai politik nekah dhepadah kelaem ajuang aki masyarakat Pengkalan. kuleh adukung tor ajung aki masyarakat Pengkalan ka berek ka temur jiah sakappennah, tor tadek partai politik se lok pendher kan ampon lastareh everifikasi neng KPU “*

Kendati demikian, segala struktur ini memiliki aturan yang harus di taati. agar penciptaan itu menjadi objektif maka harus ada aturan yang dibuat bersama yang akan memberi arah, peranan dan makna dalam sebuah totalitas. jadi objektivasi merupakan moment totalitas pemaknaan ketika para aktor sosial secara simultan melakukan eskternalisasi, atau melakukan tindakan sosial yang pada gilirannya membentuk sebuah realitas sosial objektif. Dalam perspektif fenomenologi, realitas objektif yang dimaksud tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah *intersubjektif*.

Tipe tindakan masyarakat untuk menentukan pilihan politik bukan termasuk tindakan yang didorong oleh adanya keinginan untuk mempertahankan tradisi yang sedang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Bangkalan. karena itu, tipe tindakan masyarakat bukan termasuk tipe *tradisional action* yang di gagas oleh Weber, sebab menurut tipe tindakan ini, orang kurang memperhatikan cara efektif dalam mencapai tujuan. Tipe tindakan sosial semacam ini berhubungan dengan orientasi atau dorongan tradisi suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau berdasarkan pada hukum-hukum normatif yang menjadi kesepakatan masyarakat. Mereka menentukan pilihan politik dengan cara tertentu karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat (*kebiasanya warga nadhliyin*), mengikuti titah Kiai, sesepuh, tokoh masyarakat atau orang tua mereka.

Di samping itu, masyarakat yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan visi misi partai (seorang calon), program partai (seorang calon) serta kapabilitas, akuntabilitas, kredibilitas partai (seorang calon) bukan termasuk pada tipe *affectual* atau *emmotipnal action*, sebab tipe ini merupakan tipe tindakan yang sangat mengedepankan perasaan atau emosi. *Emotion* atau *feeling* ini biasanya melahirkan kebencian yang tinggi atau menghormati seseorang Kiai atau sesuatu secara berlebihan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah satu informan Hasani Zubair bahwa:

*“yang pasti bukan nilai kewibawaannya, tapi cara kerja dan program yang sesuai dengan keinginan masyarakat Bangkalan, jika kepemimpinannya bagus dan mensejahterakan, kenapa tidak”*

*“se pasteh panekah nilai kewibawannah Keyaeh. tapeh oreng Pengkalan ngabes cara kerjanah ben program-program se cocok ka masyarakat Pengkalan, manabe Keyenah pekus pakkun etorok”*

Dipandang dari pengertian kedua tipe tindakan sosial tersebut, tindakan masyarakat menentukan pilihan politik dalam studi ini bukan termasuk kedua tipe ini. ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. *Pertama*, masyarakat dengan pertimbangan tertentu “visi misi partai (seorang calon) program partai (seorang calon) serta kapabilitas, akuntabilitas dan kredibilitas partai (seorang calon)” bertundak meninggalkan “fatwa politik” Kiai yang telah menjadi kebiasaan dengan resiko tertentu. *Kedua*, tindakan pilihan politik mereka didasarkan pada pertimbangan *means and ends of action*, seleksi cara.

Data menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Bangkalan memiliki pertimbangan tertentu dalam menentukan pilihan politik, tetapi mereka masih mempertimbangkan “fatwa politik” Kiai yang secara langsung terlibat di dunia politik praktis. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat Bangkalan kepada Kiai karena otoritas keagamaan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang Islam dan juga memiliki Santri serta Pondok Pesantren.

Tipe tindakan sosial masyarakat Bangkalan menentukan pilihan politik ini lebih dekat dengan tipe *wertational action*, karena tindakan mereka lebih mengacu pada nilai, norma atau kekuatan yang ada dalam ajaran agama. Masyarakat Bangkalan tidak menghormati “fata politik” Kiai sebagai pertimbangan menentukan pilihan politik, bukan karena didasari oleh motivasi ingin melanggar tradisi keagamaan, melainkan karena pertimbangan bahwa yang tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagai sosok *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi).

Jadi, tindakan sosial masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politik berdasarkan pertimbangan tertentu jika mengacu pada *sosial action*nya Weber, lebih tepat dikategorikan pada tipe *wertational action*. karena makna yang diberikan kepada figur Kiai sebagai *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi). mengacu pada nilai-nilai atau norma – norma yang ada dalam agama Islam. Berdasarkan analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa rasionalitas yang dianut oleh masyarakat Bangkalan sesuai dengan konsep Weber adalah *wertational action* atau rasionalitas nilai, yaitu suatu rasionalitas yang berdasarkan

pertimbangan nilai, norma yang di yakini benar karena dalam masalah politik mereka memilih tindakan dengan berpedoman pada visi misi partai, program partai, serta kapabilitas, akuntabilitas serta kredibelitasnya. yang lahir dari nilai-nilai agama Islam yang mereka miliki. Apalagi tradisi paham *ablussunnah wall jama'ah* yang di anaut NU, mumunculkan sikap relativisme yang menjadi dasar logika munculnya suatu pandangan kemasyarakatan yang tidak bercorak hitam putih.

Merujuk pada tindakan sosial sebagian masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan “fatwa politik” Kiai karena mereka memposisikan Kiai sebagai elit agama sekaligus elit politik, tindakan sosial tersebut dapat dikategorikan pada tindakan atau cara rasional menurut tipe tindakan *rasional intrumental* . Alasan yang bisa dikemukakan adalah tujuan mereka patuh dan taat kepada “fatwa politik” Kiai untuk memperoleh reward agar tidak dikatakan sebagai orang yang “kualat” atau tidak tahu etika menjadi orang NU. jadi rasionalitasnya terorientasi *in short term* dan ini merupakan ciri khas rasionalitas instrumental dengan reward yang langsung dinikmati.

Di sisi lain tindakan sosial sebagai masyarakat Bangkalan yang menentukan pilihan politiknya berdasarkan “ fatwa politik” Kiai dilihat dari sudut pandang rasionalitas nilai adalah irrasional dengan alasan bahwa seleksi cara yang dipakai menghasilkan tindakan yang tidak akan mencapai tujuan. karena tindakan yang digunakan sebagai “cara” tidak sesuai dengan makna yang diberikan kepada figur Kiai sebagai *waratsat al-anbiya'* (pewaris para nabi) yang mengacu pada nilai-nilai atau norma – norma yang ada dalam agama Islam.

Karena itu wajar dan logis apabila masyarakat Bangkalan mempertimbangkan “visi misi partai, program partai, serta kapabilitas, akuntabilitas serta kredibelitasnya” dengan tidak menjadikan “ fatwa politik” Kiai sebagai acuan yang sudah menjadi warga *nahdliyin*. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan Amin Imron bahwa :

*“setidaknya Kiai lebih terpicat pada masyarakat Bangkalan dari pada politisi yang lainnya, karena Kiai berjuang sesuai agama dan mencari ridho ALLAH SWT “*

*“ Keyeh lebbi semmak ka masyarakat Pengkalan dareh pada dhek ka politisi, karnah Keyaeh ajunag sesuai kalaben tontonan akemah ben nyareh ridhonah ALLAH SWT”*

Secara paradigmatik, tindakan sosial masyarakat Bangkalan bisa dikategorikan sesuai dengan paradigma definisi sosial, karena tindakannya didasarkan pada kesadaran, pertimbangan, penilaian, motivasi untuk menentukan pilihan politik, dengan melawan paksaan otoritas “ fatwa politik” Kiai yang telah

berlaku dalam masyarakat Bangkalan sebagai struktur sosial dengan konsekuensi menerima sanksi sosial dari masyarakat. Tetapi jika secara makro bahwa Kiai sebagai bagian terpenting dari NU dengan karakteristik dan ciri-ciri ajaran yang dianutnya dapat dikategorikan sebagai fakta sosial, karena Kiai yang terstruktur dalam organisasi NU, maka tindakan sosial masyarakat Bangkalan bisa dikategorikan pada tindakan sosial yang berpradigma fakta sosial. Dalam artian bahwa sejak NU memproklamasikan *khittah* 1926 dan keluar dari PPP telah mempengaruhi tindakan politik warga *nabdliyin*.

## Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan mengkaji fenomena-fenomena sosial tentang konstruksi sosial Tokoh Masyarakat Terhadap Kiai Yang Berpolitik Praktis di Kabupaten Bangkalan Madura. Konstruksi sosial ini dielaborasi dengan sudut pandang konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann: melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dan Tindakan Sosial Max Weber. Sebagaimana dirumuskan dalam fokus kajian, studi ini ingin menjelaskan bagaimana tokoh masyarakat Bangkalan memaknai politik Kiai dan bagaimana fragmentasi pilihan politik Kiai dipahami, serta faktor-faktor yang mendasari pergeseran pemahaman masyarakat terhadap Kiai yang berpolitik. Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai pengumpulan hingga interpretasi data lapangan, kesimpulan studi ini mengajukan beberapa kesimpulan berkaitan dengan temuan pokok tentang pemahaman tokoh masyarakat terhadap perilaku Kiai dalam dinamika politik lokal. Dari hasil temuan studi sebagaimana dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat dua varian pandangan masyarakat tentang makna Kiai yang berpolitik. 1) Sebagian (kecil) mereka setuju dengan keterlibatan Kiai di politik. Alasannya, dengan terlibat di politik akan lebih memudahkan para Kiai untuk melaksanakan tugas utamanya sebagai pemimpin umat dan pengasuh Pondok Pesantren. Bahkan mereka akan memiliki legitimasi politik untuk menegakkan paham ahlussunnah wal jama'ah, sebagai mana yang menjadi pedoman warga *nabdliyin*. 2) Sebagian (besar) mereka tidak setuju dengan keterlibatan Kiai politik. Alasannya, akan mengganggu tugas utamanya.

Hanya saja, baik yang setuju maupun yang tidak, keterlibatan Kiai di politik akan membawa implikasi tersendiri. 1) Kiai mengalami degradasi ketokohan sebagai akibat dari semakin merosotnya karisma yang dimiliki. Otoritas keagamaannya juga semakin terkikis. 2) Dengan Kiai terlibat di politik,

perannya sebagai benteng moralitas umat menjadi taruhan. Sebab bagaimanapun, ketika Kiai bersentuhan dengan politik, berarti sedang “bermain-main” dengan kekuasaan. Hal yang demikian, politik akan cenderung hanya dijadikan sebagai medis untuk meraih kekuasaan, dan predikat menjadi teladan umat (*al-uswah al-basanah*) tentu saja akan tercerabut dari legitimasi sosial masyarakat. Karena itu, dalam pemahaman tokoh masyarakat Bangkalan, Kiai yang berpolitik tidak semata-mata dimaknai dalam arti orientasi kekuasaan, melainkan politik dalam arti pendidikan politik dan ini bisa dilakukan melalui pesantren. Sebagai catatan penting, karena posisi strategis Kiai adalah mengawal moralitas atau dalam bahasa agamanya amar *ma'ruf nahi munkar*, maka ketika terlibat di politik, justru kecenderungan yang terjadi adalah Kiai mereduksi karisma yang telah dimilikinya. Hal yang demikian inilah, peran strategis Kiai sebagai pemimpin umat sedikit demi sedikit akan ditinggalkan oleh umat. *Kedua*, fragmentasi politik politik Kiai dipahami oleh tokoh masyarakat Bangkalan dalam dua bentuk. 1) Telah terjadi segmentasi kepemimpinan Kiai, terutama kepemimpinan politik Kiai di masyarakat. Kekuasaan politik tidak lagi terpusat pada satu Kiai, melainkan terdistribusi ke seluruh Kiai yang terlibat di politik. Akibatnya, ketika berpihak pada salah satu kekuatan politik, Kiai dinilai tidak lagi netral. 2) Sebagai akibat langsung dari yang pertama, masyarakat menjadi terpolarisasi. Perpecahan di kalangan umat-pun kadang tidak bisa dihindari karena para Kiai sendiri sibuk dengan kepentingan politiknya, sementara urusan umat menjadi terkesampingkan. Bahkan fragmentasi politik di akar rumput cenderung semakin menguat ketika kepentingan-kepentingan politik dibumbui teks-teks agama sebagai pembenar. Meski demikian, Kiai yang mengalami fragmentasi pilihan politik, bukan berarti ketaatan mereka terhadap Kiai mengenai masalah keagamaan menjadi hilang sama sekali. Semua Kiai, menurut pandangan mereka, sangat dihormati. Meskipun harus dicatat bahwa penghormatan itu semata-mata karena posisi Kiai sebagai tokoh agama yang memimpin pesantren.

*Ketiga*, keterlibatan Kiai politik melahirkan pergeseran pemahaman di kalangan masyarakat Bangkalan. Perubahan ini disebabkan karena beberapa faktor. 1) Faktor konsistensi (*istiqamah*) Kiai. Fenomenanya, Kiai sering-untuk mengatakan selalu-berhijrah dari satu partai politik ke partai politik yang lain. Bahkan, ketika berkiprah di eksekutif maupun legislatif, baik secara langsung Kiai terjun ke politik maupun yang didukung oleh Kiai, justru mengecewakan umat karena tindakannya lebih mementingkan kekuasaan daripada menjalankan fungsi amar *ma'ruf nahi munkar*. Kesan ini menjadi kredibilitasnya dipertanyakan.

2) Akibat dari hal tersebut, Kiai tidak memiliki keberpihakan kepada umat, justru yang terjadi adalah Kiai cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. 3) Karena rasionalitas pemilih. Dalam menentukan pilihan politik, masyarakat tidak semata-mata melihat figur Kiai, melainkan pada aspek visi dan misi serta program yang ditawarkan, baik oleh partai politik maupun seorang calon. Kiai dianggap gagal mengembangkan pendidikan politik dan rekayasa sosial kemasyarakatan melalui pendidikan dakwah.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, M., & Muhtadi, R. (2017). LANDASAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KIAI YANG BERPOLITIK PRAKTIS. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(2), 155-183.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3ES.
- Campbell, Tom. 1994. Seven Theories Of Human Society, Alih bahasa Budi Hardiman, Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius.
- Collin, Finn. 1997. Social Reality. London and New York: Routledge
- Dhofier, Zamakhsyari. 1985, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai .Jakarta: LP3ES.
- Hasbullah. 1999. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan .Jakarta:PT. Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006 “Metodelogi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi”. Bandung; Penerbit PT.Remaja Rosdakarya.
- Schütz, A. (1967). The Phenomenology of the Social World. Evanston, IL: Northwestern University Press.

## ***Fenomenologi Konstruksi Sosial pada Kiai yang Berpolitik Praktis***

\_\_\_\_\_. (1970). *On Phenomenology and Social Relations*. Chicago: The University of Chicago Press

Suprayogo, Imam., 2007, *Kiai Dan Politik*. Malang: UIN-Malang Press.

Syamsuddin, M. (2013). Kiai dan politik: keterlibatan kiai madura dalam politik praktis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 7, 47-72.

Waters, Malcolm, 1994, *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publications.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M